

EVALUASI DAN STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO)

INTISARI

Tuntutan akuntabilitas berkembang pesat sejak masa reformasi. Tidak hanya akuntabilitas keuangan yang menjadi tuntutan publik tapi juga akuntabilitas kinerja. Oleh sebab itulah pemerintah kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Permasalahan yang terjadi di Kabupten Kulon Progo ialah pada tahun 2014, Kabupaten Kulon Progo tidak mengalami peningkatan kategori dalam penilaian akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut menunjukkan masih ada kekurangan dalam implementasi SAKIP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penetapan indikator kinerja, mendeteksi faktor-faktor penyebab permasalahan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. *Performance Blueprint* digunakan untuk menganalisis ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara umum sudah berorientasi pada *service delivery outcome*. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam akuntabilitas kinerja di tingkat SKPD ialah perubahan peraturan perundangan, sosialisasi yang tidak tepat sasaran, kuantitas dan kualitas SDM, dan data kinerja yang tidak akurat. Sedangkan pada tingkat Pemda disebabkan belum adanya konsistensi antara sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan perbedaan persepsi di antara evaluator. Strategi yang dilakukan yaitu mengadakan pendampingan untuk SKPD, mengadakan koordinasi triwulanan dan membangun sistem informasi yang terintegrasi.

Kata kunci: Akuntabilitas kinerja, *Performance Blueprint*, analisis empat kuadran Friedman, indikator kinerja

***EVALUATION AND STRATEGY IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
AGENCIES PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM (STUDIES IN
GOVERNMENT KULON PROGO REGENCY)***

ABSTRACT

Demand for accountability has developed rapidly since the reformation era. Not only financial accountability that is demanded by the public but accountability for performance as well. That is why the government then issued Instructions President of the Republic of Indonesia Number 7 of 1999 and updated by Presidential Decree Number 29 of 2014 concerning Government Agencies Performance Accountability System (SAKIP).

The problems that occurred in Kulon Progo was in 2014, had no increase of category in the performance accountability assessment conducted by the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform. It shows that there are still shortcomings in the implementation of SAKIP.

This study aimed to evaluate performance indicators, to detect factors that cause the problems and the strategies used to improve performance accountability. Performance blueprint was used to analyze the accuracy performance indicators used.

This study used a qualitative method with case study approach. The results showed that performance indicators Kulon Progo regency government in general has been oriented to service delivery outcomes. The factors that caused problems in accountability performance SKPD level was the change of legislation, mistargeted socialization, quantity and quality of human resources, and inaccurate performance data. While at the local level, the problems were lack of consistency between the planning system and the budgeting system and differences in perception between the evaluator. Strategies undertaken were convening assistance to SKPD, holding quarterly coordination and building an integrated information system.

Keywords: Performance accountability, Performance Blueprint, Friedman's analysis of four quadrants, performance indicators